



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN
1999/2000.

Pasal 1

- (1). Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - b. Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enampuluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus empat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 58.481.565.939.589,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Rincian pendapatn Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :

a. Pengeluaran ...

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 170.173.672.419,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	93.996.947.844,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	952.208.719.823,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp	39.752.522.819,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	365.274.393.288,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	120.507.306.859.617,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	415.868.310.581,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	509.733.499.589,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	137.941.707.451,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	17.744.691.275.659,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	302.191.944.019,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	7.087.582.487.187,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	463.304.317.609,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMANA	Rp	924.843.623.185,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp	25.060.525.796,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	1.771.611.426.946,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	487.395.680.993,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17	SEKTOR HUKUM	Rp 1.009.094.805.306,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 4.840.980.883.706,00
		19. SEKTOR ...
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 2.573.606.776.001,00
20	SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN	Rp 9.921.226.265.00,00

B. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp 487.898.891.707,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp 3.402.123.824.787,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp 3.416.364.989.351,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp 287.718.726.423,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp 28.372.759.033.828,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp 5.312.581.873.940,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 2.936.942.039.855,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp 938.009.854.714,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp 16.083.659.438.178,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp 837.142.459.628,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 7.510.368.622.887,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 324.527.922.206,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 4.796.574.895.189,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp 2.978.841.228.136,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp 412.534.875.227,00
		16. SEKTOR ...
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 713.787.645.973,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp 196.149.348.922,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 860.385.274.330,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 301.272.029.664,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 1.731.843.493.327,00

- (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2001

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 113



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

I. UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 12.751.097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih Kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan Negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Penerimaan perpajakan	Rp112.904.813.566.055,00
0110 Pajak Penghasilan (PPH)	
0120 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak	Rp 59.682.747.737.521,00
320Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB)	Rp 4.107.266.648.375,00
0210 Bea masuk	Rp 4.176.990.000.000,00
0220 Cukai	Rp 10.331.219.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	Rp 858.596.881.718,00
0240 Bea meterai	Rp 610.944.298.441,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	Rp 58.481.565.939.589,00
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp 38.023.750.597.796,00
0320 Penerimaan gas alam	Rp 20.457.815.341.793,00

Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penerimaan Negara Bukan Pajak		Rp 33.046.237.741.172,00
0410	Pendapatan pendidikan	Rp 8.554.086.690,00
0411	Uang pendidikan	Rp 5.382.956.308,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp 2.415.522.731,00
0413	Uang ujian menjalankan praktek	Rp 18.054.000,00
0419	Penerimaan pendidikan lainnya	Rp 737.553.651,00
0480	Pendapatan pendidikan swadana	Rp 445.223.197.257,00
0481	Pendapatan pendidikan swadana	Rp 445.223.197.257,00
0510	Penjualan hasil produksi dan sitaan	Rp 39.922.893.909,00
0511	Penjualan hasil pertanian dan perkebunan	Rp 2.828.780.379,00
0512	Penjualan hasil peternakan	Rp 77.184.642,00
0513	Penjualan hasil perikanan	Rp 13.048.032,00
0514	Penjualan hasil sitaan	Rp 8.582.266.531,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp 2.859.040.800,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp 136.305.225,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp 16.886.444.953,00
0519	Penjualan lainnya	Rp 8.539.823.347,00
0520	Penjualan aset tetap	Rp 61.676.859.826,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp 6.028.123.734,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp 629.873.201,00
0523	Penjualan sewa beli	Rp 28.631.396.390,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dan dihapuskan	Rp 26.387.466.501,00
0530	Pendapatan sewa	Rp 10.543.603.989,00
0531	Sewa rumah dinas, dan rumah negeri	Rp 5.077.840.053,00
0532	Sewa gedung, bangunan, dan gudang	Rp 2.162.865.242,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	2.214.560.561,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	1.088.338.133,00
0540	Pendapatan jasa I	Rp	571.493.560.862,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	58.374.126.751,00
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, dan museum	Rp	654.601.081,00
0453	Pendapatan surat keterangan, visa paspor, SIM, STNK, dan BPKB	Rp	215.215.701.310,00
0544	Pendapatan sertifikat pendaftaran tanah	Rp	40.610.181.005,00
0545	Pendapatan hak dan perizinan	Rp	203.603.681.796,00
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, dan pemeriksaan	Rp	4.403.148.194,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	Rp	25.206.543.849,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	Rp	4.579.659.021,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp	18.845.917.855,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	1.472.279.801.740,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	95.355.060.306,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp	892.948.554.640,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	8.136.634.622,00
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp	5.746.746.209,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak- pajak Negara dengan Surat Paksa	Rp	2.516.947.540,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	8.397.147.473,00
0557	Bea lelang	Rp	82.496.128.126,00

0539 Sewa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0558	Pendapatan biaya pengurusan piurang Negara dan lelang Negara	Rp	42.156.046.314,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	344.526.536.510,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	237.816.145.690,00
0569	Penerimaan rutin luar negeri lainnya	Rp	237.816.145.690,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp	1.650.175.105.331,00
0581	Pendapatan penjualan swadana	Rp	6.513.458.897,00
0582	Pendapatan swa swadana	Rp	951.080.862,00
0583	Pendapatan jasa swadana	Rp	1.642.710.565.572,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	29.362.134.034,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	117.675.854,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	21.217.143,00
0613	Uang meja (legas) dan upah pada panitera badan peradilan	Rp	780,272,881,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	12.514.529.574,00
0615	Ongkos perkara	Rp	1.179.230.525,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	14.749.208.057,00
0710	Pendapatan dari investasi	Rp	8.541.348.144.170,00
0711	Bagian laba dari BUMN	Rp	5.430.448.144.170,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	Rp	3.110.900.000.000,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	210.133.222.796,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	17.014.730.427,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	13.093.888.907,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	56.108.588.471,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	104.131.027.428,00

0559 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya Rp 19.784.987.563,00

0820 Pendapatan ...

0820 Pendapatan kembali belanja tahun
anggaran yang lalu Rp 63.477.251.235,00

0821 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat Rp 6.733.900.695,00

0822 Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom Rp 1.797.758.322,00

0823 Penerimaan kembali belanja
pensiun Rp 14.361.527.993,00

0824 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya Rp 5.433.366.708,00

0825 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya Rp 35.150.697.517,00

0880 Pendapatan lain-lain swadana Rp 12.719.179.221,00

0881 Pendapatan lain-lain swadana Rp 12.719.179.221,00

0890 Pendapatan lain-lain Rp 19.691.512.554.422,00

0891 Penerimaan kembali persekot, uang
muka gaji Rp 2.343.251.274,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan Rp 22.351.706.762,00

0893 Penerimaan kembali, ganti rugi
atas kerugian yang diderita oleh
Negara Rp 10.810.956.803,00

0894 Penerimaan kembali perhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS
daerah otonom berdasarkan SPM
nihil KPKN Rp 1.803.379.644,00

0895 Penerimaan hasil penjualan saham
Pemerintah pada BUMN Rp 3.727.189.531.167,00

0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp 15.927.013.728.772,00

JUMLAH

Rp204.432.617.246.816,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

RINCIAN ...

RINCIAN PENERIMAAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

0910	Pinjaman Program	Rp 25.200.896.518.907,00
0920	Pinjaman Proyek	Rp 24.383.103.382.553,00
	JUMLAH	Rp 49.583.999.901.460,00

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

01	SEKTOR	
01.1	Subsektor Industri	Rp 93.996.947.844,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp 93.996.947.844,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	Rp 279.818.243.139,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp 672.390.476.684,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 952.208.719.823,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

03.1	Subsektor Pengembangan Sumber		
	Daya Air	Rp	17.472.282.693,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	22.280.240.126,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	39.752.522.819,00

04 SEKTOR ...

04	SEKTOR TENAGA KERJA		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	365.274.393.288,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	365.274.393.288,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	87.229.458.497,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	64.543.962.771,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	120.220.381.572.312,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	135.151.866.037,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	Rp	120.507.306.859.617,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METROLOGI
DAN GEOFISIKA

06.1	Subsektor Prasarana jalan	Rp	30.687.887.986,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	35.344.449.723,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	211.001.313.871,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	73.661.953.487,00
06.5	Subsektor Metrologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	65.172.705.514,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	Rp	415.868.310.581,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	503.207.988.195,00
------	------------------------	----	--------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

07.2	Subsektor Energi	Rp	6.525.511.394,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	509.733.499.589,00

08 SEKTOR ...

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	26.162.984.340,00
08.2	Subsektor Energi	Rp	111.778.723.111,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	137.941.707.451,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	17.645.076.940.935,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	99.614.334.724,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	17.744.691.275.659,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	12.111.359.928,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	290.080.584.091,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	302.191.944.019,00

12. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	6.513.296.225.676,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	447.318.765.844,00
12.4	Subsektor Kebudayaan Nasional dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Kepercayaan		
	Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	115.975.499.681,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	10.991.995.886,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	Rp	7.087.582.487.187,00
			12 SEKTOR ...
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	463.304.317.609,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp	463.304.317.609,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	171.899.832.840,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	752.943.790.345,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp	924.843.623.185,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	18.559.489.932,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	6.501.035.864,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	25.060.525.796,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

15 SEKTOR AGAMA

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan

Beragama Rp 296.875.938.607,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan

Agama Rp 1.474.735.488.339,00

Jumlah Sektor Agama Rp 1.771.611.426.946,00

16 SEKTOR ...

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan

Terapan dan Dasar Rp 297.076.708.424,00

20.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Rp 44.181.492.917,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan

Rp 2.617.646.326,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan

Statistik Rp 143.519.833.326,00

Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

Rp

17 SEKTOR HUKUM

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional

Rp 848.704.484.408,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum

Rp 160.390.320.898,00

Jumlah Sektor Hukum

Rp 1.009.094.805.306,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

18.1 Subsektor Aparatur Negara

Rp 4.454.138.228.831,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan

Pelaksanaan Pengawasan

Rp 386.842.654.875,00

Jumlah Sektor Aparatur Negara dan

Pengawasan

Rp 4.840.980.883.706,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA		
19.1	Subsektor Politik	Rp 120.985.213.877,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp 1.798.026.054.556,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 654.595.507.568,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp 2.573.606.776.001,00
		20 SEKTOR ...
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
20.2	Subsektor ABRI	Rp 9.921.226.265.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp 9.921.226.265.000,00
	JUMLAH	Rp170.173.672.972.419,00

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
PEMBIAYAAN RUPIAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

01 SEKTOR INDUSTRI		
01.1	Subsektor Industri	Rp 237.759.143.529,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp 237.759.143.529,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp 1.901.959.875.149,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp 17.482.353.525,00
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	Rp 1.919.442.228.674,00
03 SEKTOR PENGAIRAN		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp 331.549.562.056,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

03.2	Subsektor Irigasi	Rp 735.273.395.964,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp 1.066.822.958.020,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp 117.236.774.736,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp 117.236.774.736,00

05 SEKTOR ...

08. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp 28.502.748.030,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp 50.709.403.964,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp 3.117.870.562.497,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp 22.534.755.292.840,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp 1.096.066.016.850,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	Rp 26.827.904.024.181,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA

06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp 741.612.502.336,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp 185.939.327.837,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp 134.340.806.275,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp 145.370.406.689,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp 17.962.027.430,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	Rp 1.225.225.070.567,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	48.316.920.548,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	695.606.075.384,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	743.922.995.932,00

08 SEKTOR ...

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	51.960.421.953,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	17.572.453.352,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	69.532.875.305,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	13.301.441.652.677,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	861.262.095.301,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	14.162.703.747.978,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	469.648.323.875,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	64.146.872.578,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	533.795.196.453,00
11.	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp 3.497.374.928.330,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp 205.731.522.558,00
11.4	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp 60.031.259.327,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp 60.531.342.635,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	Rp 3.823.669.052.850,00
		12 SEKTOR ...
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp 230.444.271.441,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 230.444.271.441,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp 304.214.293.694,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp 1.549.493.971.523,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 558.497.572.009,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 2.412.205.837.226,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp 1.297.968.319.415,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp 13.340.856.063,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 1.311.309.175.478,00

15 SEKTOR AGAMA

15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp 46.448.298.573,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp 265.009.380.174,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp 311.457.678.747,00

16 SEKTOR ...

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp 159.892.122.441,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp 55.902.435.094,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 62.399.635.434,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp 54.565.153.442,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp 32.062.266.766,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp 164.397.860.409,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 529.219.473.586,00

17 SEKTOR HUKUM

17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp 14.983.723.996,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp 48.351.865.014,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp 129.634.109.357,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	Jumlah Sektor Hukum	Rp	192.969.698.367,00
18	SEKTOR APARTUR NEGARA DAN PENGAWASAN		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	457.615.285.676,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	29.433.046.142,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	487.048.331.818,00
			19 SEKTOR ...
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA		
19.1	Subsektor Politik	Rp	7.125.562.382,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	29.244.854.466,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	91.081.397.598,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	127.451.814.446,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	Rp	
20.2	Subsektor ABRI	Rp	605.141.988.428,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	583.120.747.957,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	
	JUMLAH		Rp 57.518.383.085.719,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
PEMBIAYAAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

01	SEKTOR INDUSTRI		
01.1	Subsektor Industri	Rp	250.139.748.178,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	250.139.748.178,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	1.459.216.593.402,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	23.465.002.711,00
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	Rp	1.482.681.596.113,00
			03 SEKTOR ...
03	SEKTOR PENGAIRAN		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	1.225.373.788.087,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	1.124.168.243.244,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	2.349.542.031.331,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	170.481.951.687,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	170.481.951.687,00
07.	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	76.159.257.453,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	2.609.995.480,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	8.785.326.614,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	1.413.236.451.246,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha

Kecil Rp 44.063.978.854,00

Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi

Rp 1.544.855.009.647,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA

06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 3.220.701.186.984,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 711.076.578.792,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp 82.047.714.052,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp 73.531.323.545,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika

Rp 4.087.356.803.373,00

07 SEKTOR ...

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan Rp 112.787.200,00

07.2 Subsektor Energi Rp 2.192.906.256.723,00

Jumlah Sektor Pertambangan dan
Energi

Rp 2.193.019.043.923,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI

08.1 Subsektor Pariwisata Rp

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp 868.476.979.409,00

Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi

Rp 868.476.979.409,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 1.920.401.041.057,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan

Rp 554.649.143,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		Rp 1.920.955.690.200,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	245.629.569.188,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	57.717.693.987,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		Rp 303.347.263.175,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	3.652.972.445.851,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	32.816.215.184,00
			11.3 Subsektor ...
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	17.200.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	893.709.002,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga		Rp 3.686.699.570.037,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	94.083.650.765,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		Rp 94.083.650.765,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp 287.359.739.998,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp 2.096.119.633.025,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 889.684.940,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 2.384.369.057.963,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKAAN		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp 1.661.827.024.734,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp 5.705.027.924,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp 1.667.532.052.658,00
15 SEKTOR ...		
15 SEKTOR AGAMA		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp 973.054.021,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp 100.104.142.459,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp 101.077.196.480,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp 144.494.513.443,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp 16.792.584.754,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp 15.883.049.943,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

16.4	Subsektor Kelautan	Rp	1.178.905.497,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	4.860.575.862,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	1.358.542.888,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	184.568.172.387,00
17	SEKTOR HUKUM		
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp	3.179.650.555,00
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	3.179.650.555,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	363.027.057.522,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	10.309.884.990,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	373.336.942.512,00
			19 SEKTOR ...
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA		
19.1	Subsektor Politik	Rp	5.079.380.328,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	168.740.834.890,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	168.740.834.890,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
20.2	Subsektor ABRI	Rp	518.047.748.225,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	25.533.008.717,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	543.580.756.942,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JUMLAH

RP 24.383.103.382.553,00

Pasal 3

Sisa Anggaran lebih sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4133